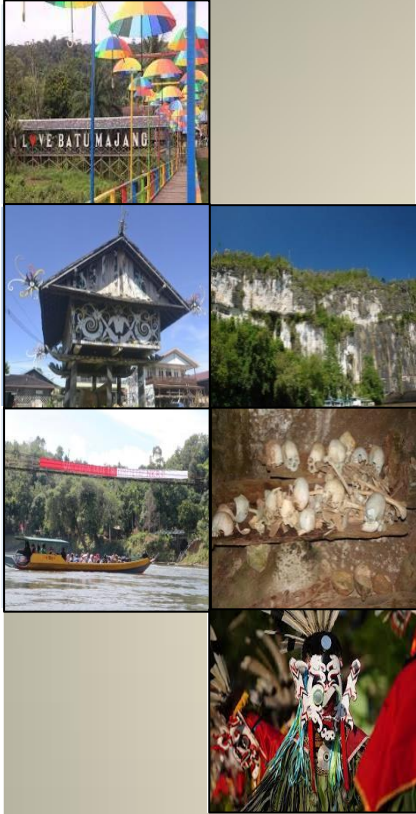


2023



Laporan Akhir ROAD MAP EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAHAKAM ULU 2023-2027



Kerjasama antara Unit Layanan Strategis-
Pengembangan Sumber Daya Lokal & Kawasan
(ULS-PASDALOKA) Universitas Mulawarman
dengan Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu



**ROAD MAP EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MAHAKAM ULU
2023-2027**

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Laporan Roadmap Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2027 telah diselesaikan dengan baik. Roadmap Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2027 ini memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2023-2027. Roadmap Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu ini juga menjabarkan secara lengkap tentang masa pelaksanaan program dan kegiatan beserta stakeholders yang bertanggung jawab. Roadmap ini juga menjelaskan keterlibatan OPD di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi secara aktif dalam membantu penyusunan roadmap ini. Semoga dokumen ini dapat membantu mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pusat ekonomi kreatif, khususnya mendukung visi Kabupaten Mahakam Ulu yakni “Membangun Mahulu Untuk Semua Sejahtera Berkeadilan (Jilid II)”.

Ujoh Bilang, November 2023

a.n. Bupati Mahakam Ulu

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Yason Liah, S.Hut., M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

Pemerintah sebagai *policymakers* telah menyadari pentingnya ekonomi kreatif dan pentingnya kebijakan yang membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah telah menyusun landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif, dimana salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional 2018–2025. Rindekraf memiliki visi untuk menjadikan Ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mengamanatkan adanya pendelegasian pelaksanaan Rindekraf, salah satunya ke Pemerintah Daerah sesuai dengan bunyi Perpres Rindekraf Pasal 7 Ayat (2), yaitu: “Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian dan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

Hal ini juga sejalan dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021–2026 dengan visinya “Membangun Mahulu untuk semua sejahtera, berkeadilan (Jilid II)”, serta erat kaitannya dengan misi ke-2 RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Menindaklanjuti hal tersebut, supaya pengembangan ekonomi kreatif lebih terarah, berkesinambungan, dan menyentuh nilai tambah yang tinggi, maka perlu dilakukan penyusunan *roadmap* (peta jalan) pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu Sehingga diperoleh identifikasi potensi, permasalahan, penentuan arah, strategi, serta kebijakan ekonomi kreatif.

Perpres Rindekraf pada Pasal 6 Ayat (1) juga telah mengidentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yaitu: (1) *game developer*; (2) arsitektur; (3) desain interior; (4) desain komunikasi visual; (5) desain produk; (6) *fashion*; (7) film, animasi, dan video; (8) fotografi; (9) kriya; (10) kuliner; (11) musik; (12) penerbitan; (13) periklanan; (14) seni pertunjukan; (15) seni rupa; (16) televisi dan radio; serta (17) aplikasi. Untuk merangsang fokus *roadmap* ekonomi kreatif, maka dokumen ini berfokus pada paradigma bahwa keseluruhan subsektor di atas bisa saling terhubung dan menguatkan satu sama lain. Sejumlah subsektor yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi dan mayoritas dalam hal bidang usaha di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu: kuliner, kriya, dan *fashion*, dan subsektor yang telah

dibedah oleh Badan Ekonomi Kreatif sebagai lokomotif ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu seni pertunjukan, dan subsektor yang mendukung subsektor tersebut sebelumnya dan juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, yaitu aplikasi, film, animasi dan video, dan periklanan.

Tahapan Penyusunan

Perpres Nomor 142 Tahun 2018 telah merumuskan strategi tahap dua (2020 dan 2025), seperti menggerakkan kolaborasi diantara segenap pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi dan inovasi dari hasil riset, serta memperluas akses pendanaan pelaku usaha kreatif. Menindaklanjuti hal itu, diperlukan rincian yang mengikutkan konteks Kabupaten Mahakam Ulu dan situasi terkini yang memengaruhi implementasi strategi Rindeknas di level Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen *roadmap* ini adalah panduan pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu yang berbasis kolaborasi dengan memasukkan segenap pemangku kepentingan dalam konsep *pentahelix* plus peraturan (*hexahelix*). Masukan paling berharga akan berasal dari pelaku industri kreatif, dan pada realitanya, relasi antara misi ekonomi kreatif Kabupaten dan versi dari pelaku industri akan menentukan dinamika ekonomi kreatif Kabupaten dan wajah ekonomi Kabupaten secara keseluruhan.

Maksud kegiatan perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2027 disusun dalam bentuk dokumen naskah akademik (*roadmap* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023-2027) adalah sebagai pedoman pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2027 melalui basis potensi ekonomi lokal dalam rangka mencapai target dan sasaran Rindekraf Nasional tahun 2018-2025 dan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019-2024. Sasaran dari kegiatan perencanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi potensi dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu; (2) Perumusan visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu; (3) Merancang tujuan dan sasaran pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu; (4) Menginduksi program dan indikasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu (meliputi arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif, serta program-program yang akan

dilakukan); serta (5) Rencana aksi dan lini waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah pemekaran dari wilayah kabupaten Kutai Barat dengan memiliki kampung Ujoh Bilang untuk menjadi Ibukota Kabupaten yang telah diresmikan sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang “Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu”. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari dengan jumlah keseluruhan 50 kampung, dimana seluruh kampung tersebut berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.

Sepanjang tahun 2021-2022, jumlah penduduk yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Mahakam Mahulu mengalami penurunan sebesar 1.475 jiwa (-4,21%), dimana jumlah penduduk di 2021 mencapai 35.010 jiwa, sementara pada 2022 adalah 33.535 jiwa. Meskipun selama kurun waktu tersebut terdapat pengurangan yang relatif sedikit atas jumlah pendudu, tetapi ini mengindikasikan beberapa faktor. Terdapat hubungan antara jumlah penduduk yang tidak berimbang ini dengan pertumbuhan ekonomi dalam kategori sedang yaitu berkisar 1,27% (tahun 2022). Dengan pertumbuhan PDRB mencapai 1,27% ditahun 2022, kepadatan penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu masih terbilang cukup luas dengan jangkauan 2,12 jiwa/km². Angka tersebut relatif sedikit turun apabila berkaca pada tahun sebelumnya, yakni 2021 dimana tingkat kepadatan adalah 2,29 jiwa/km². Jika berkaca pada 2014 silam, ketika Mahakam Ulu sebagai Kabupaten baru yang memekarkan diri dari daerah sebelumnya yakni Kabupaten Kubar ini, hanya berpengaruh 1,70 jiwa/Km². Berkebalikannya dengan Kota Samarinda, sejak melepaskan diri dari Kutai Barat, Mahakam Ulu mencoba berbenah dalam segala pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang 2017-2022 dalam *trend* yang fluktuatif. Rerata dalam 6 tahun tersebut mencapai 3,42%. Prakiraan capaian pertumbuhan dalam kategori tinggi justru terjadi di 2020 alias ketika pandemi yaitu 5,52% dan terkecil adalah -0,22% ditahun 2021. Pada titik puncak, sejak Covid-19 menyebar di Indonesia dan episintrumnya dominan di Pulau Jawa seperti Jakarta, kini berlanjut hingga ke area terluar, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Tercatat, efek kemiskinan telah terasa juga sampai pelosok atau daerah terluar seperti Kabupaten Mahakam Ulu, dimana secara agregatnya mengacu LPE diproyeksi dengan tren dari 2017 ke 2022 adalah 4,23% (2017), 4,29% (2018), 5,4% (2019), 5,52% (2020), -0,22% (2021), serta 1,27% (2022).

Persentasi ini bahkan melebihi dari capaian ditingkat Kalimantan Timur selama dua tahun (5,94% dan 6,10%).

Dalam konteks nominal rupiah (Rp), rata-rata penerimaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu selama tahun anggaran 2015-2021 adalah Rp 1.283.175.860 ribu, sedangkan belanja daerahnya sebesar Rp 1.092.443.159 ribu. Dengan kata lain, dengan surplus anggaran rata-rata Rp 190.732.701 ribu. Umumnya, kinerja APBD Mahakam Ulu terbilang “tidak terserap optimal”. Anehnya, ada periode dimana tahun anggaran pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu lebih tinggi dari pada pengeluaran. Ambil contoh untuk periode 2015 dan 2018-2020, dimana dengan penerimaan yang jauh lebih besar ketimbang belanja daerah, memicu surplus anggaran. Ini tampak berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya yakni 2016-2017 dan 2021 karena realisasi pengeluaran pemerintah justru lebih boros ketimbang realisasi pendapatan daerah, sehingga menghasilkan defisit anggaran. Mengacu realisasi penerimaan, yang tertinggi pada 2020 sebesar Rp 1.563.646.751 ribu dan yang terkecil di 2015 yaitu Rp 824.507.906 ribu. Untuk realisasi belanja daerah, yang terbesar justru di 2021 (Rp 1.830.587.222 ribu) dan paling rendah pada 2018 (Rp 185.045.511 ribu). Disatu sisi, Kabupaten Mahakam Ulu sempat mengalami surplus anggaran tertinggi di 2018 sebesar Rp 1.090.360.227 ribu, sementara surplus yang terendah di 2020 yaitu Rp 2.474.986 ribu. Di 2021, merupakan defisit anggaran yang terparah hingga Rp -378.059.321 ribu dan defisit yang terendah pada 2016 mencapai Rp -308.409.432 ribu.

Pada kasus di Kabupaten Mahakam Ulu, sejak 2017-2022, rata-rata perolehan IPM diangka 67,26 poin. Mengadopsi dari publikasi Fauzi (2017), penilaian dalam IPM terbagi menjadi empat standar: rendah (IPM <60), sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan sangat tinggi (≥ 80). Oleh karenanya, nilai IPM Mahakam Ulu tergolong “sedang”. Selama 6 periode, IPM terkuat berada di 2022 dengan skor 68,75 poin. Akan tetapi, IPM terlemah pada tahun 2017 dengan skor 65,51 poin. Meski IPM Kabupaten Mahakam Ulu berada pada jalur yang positif, namun jika diamati secara seksama, di tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak gangguan pandemi yakni 67,09 poin. Selain itu, perolehan IPM di Kabupaten Mahakam Ulu adalah yang terendah bila dikomparasikan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur

Visi dan Misi Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu

Dokumen *roadmap* ini juga mencakup perumusan visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan aspirasi dan kondisi ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu saat ini. Untuk melaksanakan itu, dibutuhkan strategi dan program yang bukan hanya implementatif, tetapi juga tepat sasaran. Terakhir,

harus dilaksanakan evaluasi secara konsisten dan berkesinambungan. Gambaran proses penyusunan *roadmap* ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu mengikuti model proses manajemen strategis sebagaimana yang ditampilkan. Pasca diidentifikasi potensi dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu, maka dirumuskan visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu.

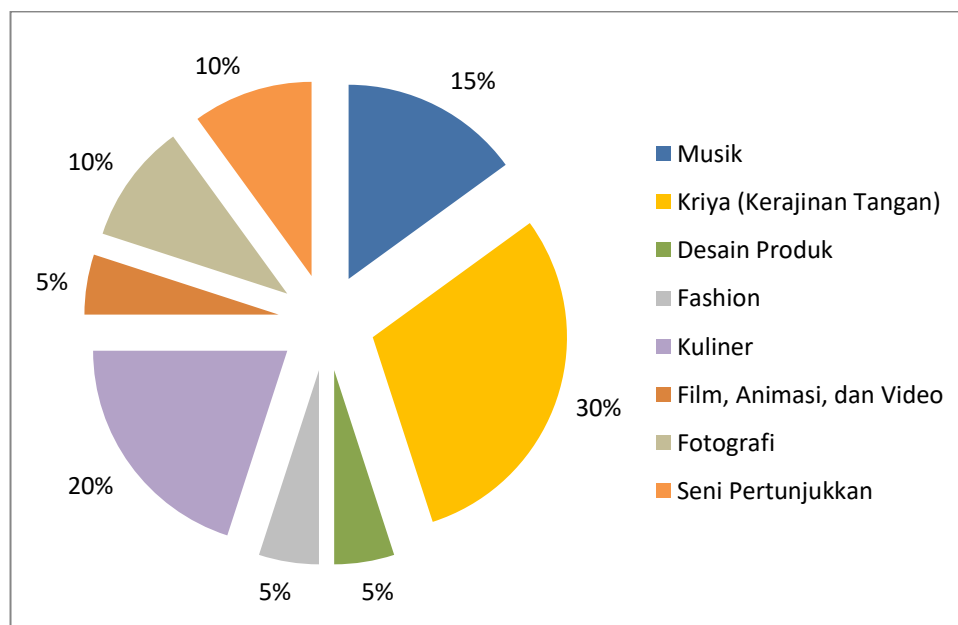
Ditetapkan tujuan dan sasaran pengembangan ekonomi kreatif yang diiringi bentuk program kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sudah dirumuskan. Adapun visinya adalah “Menjadikan Kabupaten Mahakam Ulu menjadi Pusat Ekonomi Kreatif yang Unggul dan Berdaya Saing di Kalimantan Tahun 2023-2027” Visi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu yang ditetapkan ini merupakan panduan arah pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu yang sejalan dengan misi 4 dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2019–2024, yaitu mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif. Sedangkan, misi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif serta ekosistem pendukungnya di Kabupaten Mahakam Ulu; (2) Mewujudkan sumber daya manusia ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu yang unggul dan berdaya saing; (3) Mengoptimalkan infrastruktur dan kolaborasi ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu; (4) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan daya saing ekonomi kreatif; serta (5) Mendorong kecintaan dan solidaritas sosial dan ekonomi terhadap Kabupaten Mahakam Ulu.

Profile Ekraf Kabupaten Mahakam Ulu

Roadmap ekonomi kreatif Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023-2027 ini didesain untuk mengakomodasi aspirasi pelaku ekonomi kreatif dari seluruh subsektor dan segenap pemangku kepentingan, terutama mereka yang tergabung dalam model *hexa-helix*. Objektivitas dari kajian berfokus pada pola pemetaan dan perencanaan ekonomi kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023–2027. Pendekatan analisa dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan kualitatif-deskriptif. Terdapat dua jenis data yang dimanfaatkan guna kajian ini terselenggara, yaitu data bersifat primer dan data bersifat sekunder. Khusus untuk data primer, data dihimpun di lapangan. Dalam kasus ini, teknik wawancara diselenggarakan kepada partisipan yang berperan terhadap kebijakan/regulasi, pengelolaan, tokoh sekitar, ataupun penjual produk ekonomi kreatif selama Oktober 2023. Materi wawancara diekstraksi via kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan seputar instrumen ekonomi kreatif. Partisipan tersebut merupakan informan yang diseleksi dari seluruh kriteria yang ditemukan

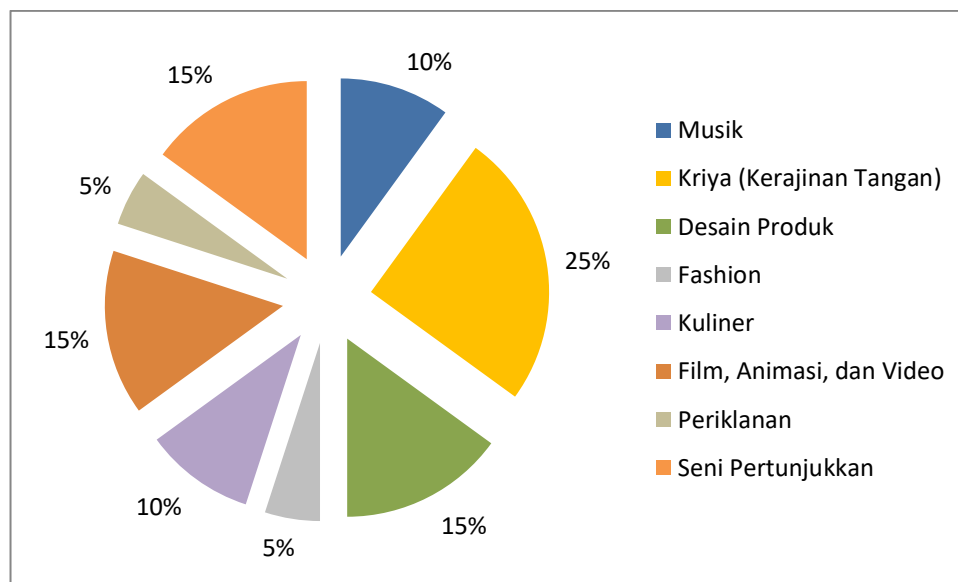
ketika dilakukan observasi. Proporsi sampel diverifikasi dengan metode survey yang mewakili populasi. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari publikasi resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mahakam Ulu, maupun instansi berwenang yang mempunyai data terkait ekonomi kreatif dan turunannya.

Sesuai dengan perincian metodologi penyusunan, unit sampel dibagi merata/berimbang berdasarkan wilayah dan profesi utama informan, dimana ada lima area yang menjadi fokus ($F = 4$ atau sampel = 20%) per Kecamatan serta profesi responden (PNS, pelaku ekraf, pemangku adat, dan komunitas yang diwakili oleh Pokdarwis) juga merata dengan frekuensi masing-masing diwakili oleh 5 sampel (25%). Disimpulkan bahwa mayoritas informan berusia 51–60 tahun (35%), 31–40 tahun (30%), dan 20–30 tahun (20%), sedangkan yang 15% adalah mereka yang berumur 41–50 tahun. Sepanjang wawancara, tidak ditemukan responden yang berusia diatas 60 tahun. Umumnya, responden berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki dengan perbandingan 60% dan 40%. Dari latar belakang pendidikan, diantaranya merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan berhasil menyanggah gelar Diploma (5%), Sarjana (20%), dan Magister (20%). Sementara itu, 25% bersertifikat SMP/SLTP atau sederajat, serta 30% berijazah SMA/SMK. Otomatis, dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, setidaknya menjadi dasar untuk menyalurkan minat maupun menambah wawasan, khususnya perihal ekonomi kreatif. Sampai sekarang, sebagian responden menyatakan bahwa ada beberapa sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah, diantaranya yang terpampang di Gambar 1 yakni: musik (15%), kriya (30%), desain produk, fashion, serta film, animasi, dan video masing-masing adalah 5%, kuliner (20%), dan fotografi ataupun seni pertunjukkan (10%).



Gambar 1. Sektor Ekraf yang Dikembangkan oleh Pemerintah

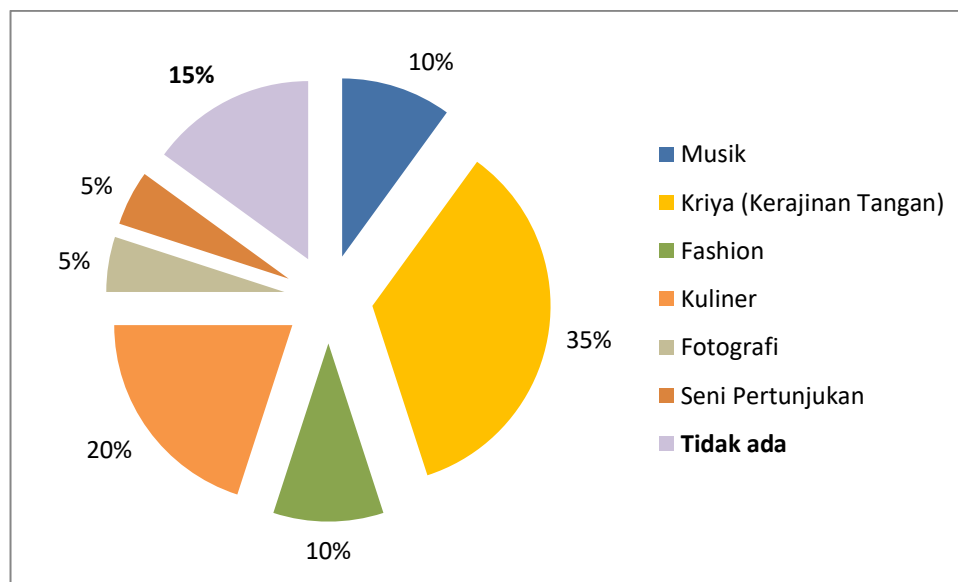
Sepengamatan tim penyusun mengacu penelusuran selama survey, beberapa alasan yang melatarbelakangi kesepuluh sektor ekonomi kreatif yang dirangsang dan didorong oleh pemerintah karena sudah ada sejak dulu. Artinya, seperti musik daerah, kriya, kuliner, dan seni pertunjukkan memang dari lama telah diwariskan oleh nenek moyang dan diteruskan oleh generasi sekarang sebagai bagian dari tradisi leluhur yang harus diselenggarakan. Ambil contoh, misalkan musik, kriya, kuliner, dan seni pertunjukkan yang menjadi satu padu dengan pelaksanaan vestifal lokal yang kerap ditampilkan ketika momen spesial seperti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ataupun upacara yang berkaitan dengan adat-istiadat. Hanya saja, empat ragam ekraf lainnya (desain produk, fashion, serta film, animasi, dan video maupun fotografi) cenderung diminati dan menjadi bagian dari budaya baru yang digerakkan oleh generasi milenial yang berusia muda. Terlepas dari cita-cita untuk meneruskan tradisi, mereka juga relatif menggemari sektor ini karena ditunjang oleh informasi dan teknologi yang semakin pesat. Bahkan, beberapa diantaranya dipadukan yang justru melahirkan konsep ekraf baru. Sejalan dengan fakta tersebut, rupanya ekraf yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah berkaitan dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Dari ketujuh belas ragam ekraf, para informan menanggapi hanya beberapa yang ditonjolkan pemerintah lokal, meliputi: musik (10%), kriya (25%), desain produk (15%), fashion (5%), kuliner (10%), film, animasi, dan video (15%), periklanan (5%), serta seni pertunjukkan (15%) seperti yang terangkum di Gambar 2.



Gambar 2. Potensi Ekraf yang Diprioritaskan

Seperti yang diketahui, sebagian besar sumber pendanaan ekraf di Kabupaten Mahakam Ulu condong dibiayai oleh APBD Kabupaten (55%) dan sebagian dari CSR (25%) dan APBD Provinsi (20%). Fakta lainnya, bahwa selain peran pemerintah (dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga) dalam pengembangan ekraf, rupanya juga ada keterlibatan dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kampung (55%) dan Dinas Sosial (45%). Rata-rata pelaku ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja berdasarkan apa yang diketahui oleh responden adalah 1–3 orang (50%), 4–6 orang (30%), dan ada juga yang lebih dari 6 orang penggiat ekraf sekitar 20%. Unikinya, dari beberapa sektor ekonomi kreatif yang ditekuni atau dikelola sendiri saat ini, 10% diantaranya mengakui menggeluti musik, 35% kriya, 20% fashion, 20% kuliner, 5% fotografi, dan 5% seni pertunjukkan (perhatikan Gambar 3). Ada 15% informan yang menyatakan jika mereka tidak menekuni ekraf dengan alasan karena memang bekerja sebagai ASN (aparatur Kampung) sehingga tidak memungkinkan bekerja di sektor ekraf tetapi memiliki inisiatif dalam menjembatani dan menggerakkan sektor itu, sudah tidak bergerak di ekraf atau dengan kata lain pensiun dan dilanjutkan oleh pelaku lain, serta ada juga sebagian kecil yang profesinya menjadi perangsang ekraf seperti Pokdarwis yang bertugas untuk memonitor, melakukan evaluasi, panitia, penghimpun, perwakilan, maupun manajemen ekraf. Dari 17 responden yang tersisa dan tergolong sebagai informan kunci, 52,9% atau lebih dari setengahnya menyatakan telah menekuni usaha ekraf ini sejak 11–15 tahun yang lalu. Disamping itu, 23,5% menyatakan menekuni kisaran 1–5 tahun, lalu jika digabungkan, 23,6% menyatakan telah terjun di dunia ekraf secara bervariasi, yaitu 6–10 tahun dan ada pula diatas 15 tahun. Artinya, tingkat lama durasi dalam menekuni ekraf, semakin menentukan kedewasaan usaha yang ada.



Gambar 3. Sektor Ekraf yang Ditekuni/Dikelola Saat Ini

Sumber ide/gagasan dalam menyalurkan ekraf, diperoleh dari latar belakang keahlian dan pendidikan (47,1%), lingkungan/komunitas (35,3%), dan sisanya berasal dari kursus (17,6%). Sampai dengan kuesioner ini dibagikan, 58,8% merespon bahwa telah mengetahui keberadaan ekraf, tetapi 41,2% diantaranya justru tidak mengenal kehadiran ekraf alias menjalankan usaha tanpa ada unsur

wawasan mengenai ekraf. Pada pertanyaan “wawasan seputar ekraf”, 64,7% responden menganggap bahwa telah menindaklanjuti prospek dan tantangan, 29,4% mengupayakan ekraf melalui perkembangan usaha, dan 5,9% pernah mendengar singkat atau hanya sebatas definisi. Intinya, 88,2% telah menghasilkan satu variasi produk dan 11,8% sudah menjalankan dua produk ekraf. Kelemahan kinerja ekraf, tampak dari target pasar produk, dimana 58,8% masih terorientasi di level Kalimantan Timur, 41,2% masih sebatas di lingkup Mahakam Ulu, serta belum ada yang terdistribusi ke luar daerah semisal menjangkau tingkat domestik maupun luar negeri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam memproduksi produk ekraf. Sebagai gambaran, berdasarkan jumlah karyawan, 41,2% memang dibantu oleh lebih dari 5 tenaga kerja, tetapi tetap kurang signifikan melihat potensi ekraf yang luar biasa di Mahakam Ulu. Belum lagi, 35,3% informan mengaku hanya mempekerjakan 1–4 tenaga kerja dan ada juga dibantu oleh kalangan keluarga (23,5%). Setidaknya, dengan memberdayakan karyawan, 52,9% merasa cukup terbantuan dan 47,1% beranggapan justru sangat berperan karena kehadiran karyawan begitu krusial dalam proses produksi. Yang jelas, semua informan mendukung bahwa infrastruktur sangat esensial terhadap kemajuan ekraf.

Ditinjau dari modal usaha, 52,9% ekraf didanai dari modal sendiri atau merupakan tabungan responden, 11,8% adalah pinjaman bank atau lembaga penyalur kredit sejenis, dan 35,3% adalah modal bersama atau yang biasa disebut dengan *sharing funding* dengan sistem bagia hasil untuk setiap keuntungan produk yang laku terjual. Seluruh responden juga menegaskan bahwa selama ini mengalami kendala dalam pengembangan ekraf. Sebagaimana telaah wawancara, masalah dominan kerap ditemui/dijumpai yakni kendala klasik mencakup: 35,3% distribusi, 29,4% finansial, 17,6% pemasaran, 11,8% SDM, serta 5,9% bahan baku. Untuk mengatasi persoalan diatas, skenario alternatif yang ditempuh oleh pelaku ekraf cukup jitu, diantaranya membuka jaringan pasar (64,7%) dan akses kemitraan (35,3%). Untuk itu, 88,2% responden menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur fisik dan 11,8% sisanya terkonsen pada perbaikan infrastruktur non-fisik. Infrastruktur fisik semisal: jalan, jembatan, pasar, rumah adat, listrik, air bersih, gedung budaya, dan museum, sedangkan infrastruktur non-fisik berupa: kelembagaan ekonomi (seperti Perusda, koperasi, dan Badan Usaha Milik Kampung), lembaga adat, koperasi, internet, dan *website*.

Selanjutnya, 35,3% lebih memilih untuk upaya pemerintah dalam memakimalkan eksistensi ekraf dari jalur pemasaran. Sementara itu, 29,4% masih berharap pada bantuan modal, 23,5% relatif memilih pendampingan dan pelatihan, dan 11,8% adalah dukungan sertifikasi. Khusus sertifikasi yang dimaksud adalah pencatatan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM menyoal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk ekraf yang telah lama dibuat agar mendapat kepastian hukum, mendapat

royalti, terbebas dari pelanggaran, dan menghindari klaim sepihak dari pelaku ekraf lain atas karya yang beredar. Terakhir, untuk mengoptimalkan nilai daya tawar ekraf di Kabupaten Mahakam Ulu, kebijakan paktis yang berimplikasi terhadap pelaku ekraf, terlebih dahulu membutuhkan sinkronisasi dari setiap lini. Sebanyak 82,4% informan beranggapan jika bantuan internal lebih dibutuhkan sekarang ini ketimbang bantuan eksternal (17,6%).

Kesimpulan

Hingga sampai saat ini, Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya untuk meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan akan memberikan dorongan bagi ekosistem ekraf di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam lensa pariwisata, produk-produk ekraf akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi yang kuat. Diantara tujuh belas sektor ekraf yang ada, hanya ada tujuh sektor yang sedang berjalan yang dikembangkan oleh pemerintah setempat meliputi: musik, kriya, desain produk, fashion, kuliner, fotografi, dan seni pertunjukkan. Dari ketujuh sektor ekraf ini, beberapa komoditas unggulan yang dikelola mandiri maupun kelompok pelaku ekraf sesuai setiap sektor antara lain: (1) Musik - alat musik tradisional dayak (Sape) serta ragam musik lokal yang dielaborasi sesuai generasi; (2) Kriya - kerajinan tangan perisai (Kelembit), patung Epak, patung Balis, dan Pantak, serta souvenir (semisal manik-manik dan kerajinan tangan lainnya); (3) Fashion - mode atau busana yang disesuaikan berupa kain dengan gaya/corak bermotif Dayak, produk kaos “*I love Mahulu*” dan sebagainya; (4) Kuliner - makanan khas lokal seperti tempoyak ikan yang berbahan durian fermentasi, umbut rotan, wadi, pisang gapit, dan kalumpe; (5) Fotografi - seni foto rumah adat Dayak atau objek yang memperlihatkan kelestarian wisata, gaya hidup orang Dayak, dan keindahan alam sekitar; serta (6) Seni pertunjukkan - ritual Hudoq Pekayang dan pertunjukkan Tarian Kolosal yang mengisahkan tentang sejarah kebesaran suku Dayak Kayan yang didalamnya menggabungkan penari, pemusik, dan penyanyi untuk memeriahkan festival daerah.

Ada peluang dan hambatan/kendala dalam pengembangan ekraf di Kabupaten Mahakam Ulu. Sembilan akar masalah pokok yang memicu perlambatan ekraf yakni: (1) keterbatasan infrastruktur; (2) pendanaan dan investasi yang minim; (3) *data base* ekraf; (4) keahlian dan pendidikan; (5) akses dan jaringan; (6) dukungan kebijakan; (7) HKI; (8) kondisi ekonomi dan kestabilan pasar; dan (9) peran Perusda. Disatu sisi, ada pula potensi yang menjadi peluang untuk dirangsang pada masa depan yaitu: (1) Mahakam Ulu adalah Kabupaten yang ditopang oleh keanekaragaman SDA yang melimpah, sehingga membuka sumber ekonomi bagi pelaku ekraf; (2) produk barang/jasa ekraf yang dihasilkan

mempunyai keunikan dan khas tersendiri; (3) sebagian komoditas ekraf sudah belangsung lama karena merupakan dari sejarah peninggalan, tradisi, dan budaya leluhur yang didorong oleh perilaku; serta (4) ADD sudah direalisasikan, namun peruntukannya harus lebih spesifik pada pengembangan ekraf.

Beberapa saran yang dapat dijadikan preferensi dan implikasi ditujukan kepada beberapa pihak sebagaimana berikut: (1) Harus ada pembedaan antara pariwisata dan ekraf. Pariwisata dan ekraf adalah dua ragam yang berbeda walaupun mempunyai keterkaitan. Umumnya, jika ada aktivitas wisata di tempat tertentu, maka disitu akan muncul ekraf dengan sendirinya, seperti: kuliner, cinderamata, dan komoditas ekraf lainnya sesuai peluang pasar; (2) Suntikan anggaran untuk ekonomi kreatif 10% ke depan bisa diperbesar lagi mengingat ekonomi kreatif jika berlangsung dengan baik ke depannya akan memberikan masukan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahakam Ulu. Meskipun bantuan APBD maupun APBN tidak optimal, tetapi juga dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD); (3) Melakukan studi banding ke daerah lain dengan varian SDA, SDM, geografis, maupun karakteristik ekraf yang serupa. Dengan demikian, strategi yang disusun dapat sesuai dengan perkembangan ekraf tanpa mengadopsi komoditas ekraf dari wilayah lain yang memiliki jenis/ragam berbeda; (4) Perlu konsen dan menonjolkan ekraf yang sudah ada, seperti Tarian Hudoq yang menjadi ciri khas dari Mahakam Ulu. Selain itu, lebih mengoptimalkan komoditas ekraf lain yang belum berjalan maksimal; serta (5) Kajian ini diharapkan mampu menjadi satu *pilot project* dari lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu dengan mendorong ekowisata melalui pembentukan Perusda, sehingga memungkinkan percepatan pemasukkan keuangan daerah. Kemudian, Kabupaten Mahakam Ulu hendaknya segera menggagas dan membentuk Dewan Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang bertugas untuk memfasilitasi, menggagas, dan menjembatani aspirasi ataupun pelaku ekraf, agar mempercepat daya saing dan nilai tambah pemberdayaan kearifan lokal yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.2.1. Maksud	7
1.2.2. Tujuan.....	7
1.3. Acuan Pelaksanaan.....	8
1.4. Sasaran.....	8
1.5. Sistematika Penyusunan	8
1.5.1. Pendekatan.....	8
1.5.2. Data	9
1.5.3. Sampel dan Informan	9
BAB 2. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	
KABUPATEN MAHAKAM ULU	11
2.1. Skenario dalam Memetakan Ekonomi Kreatif	11
2.2. Elaborasi Menuju <i>Penta-Helix</i> yang Strategis	13
2.3. Visi dan Misi Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	17
BAB 3. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN EKONOMI	
KREATIF KABUPATEN MAHAKAM ULU	21
3.1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	21
3.2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	23
3.3. Sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif	23
BAB 4. GAMBARAN WILAYAH DAN HASIL KAJIAN	28
4.1. Posisi Geografis.....	28

4.2. Demografis	30
4.3. Perekonomian: PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	33
4.4. Postur Keuangan Daerah	36
4.5. Kinerja Pembangunan Manusia.....	41
4.6. Karakteristik Informan	44
4.7. Terminologi Ekonomi Kreatif	51
4.7.1. Jenis-Jenis Ekonomi Kreatif.....	51
4.7.2. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif	57
4.8. <i>Profile</i> Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu.....	60
4.9. Potret Kendala yang Dihadapi.....	64
4.10. Rencana Aksi berdasarkan Kewenangan OPD	67
BAB 5. PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Rekomendasi Kebijakan.....	86
DAFTAR REFERENSI	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perbandingan Distribusi Persentase PDB dan PDRB ADHB menurut Sektor Industri Pengolahan di Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	2
Grafik 1.2.	Perbandingan Distribusi Persentase PDB dan PDRB ADHB menurut Sektor Perdagangan di Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%).....	3
Grafik 1.3.	Perbandingan Distribusi Persentase PDB dan PDRB ADHB menurut Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum di Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	4
Grafik 1.4.	Perbandingan Distribusi Persentase PDB dan PDRB ADHB menurut Sektor Jasa Lainnya di Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%).....	5
Grafik 4.1.	IPM di Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2017–2022.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Unsur dalam Dimensi “A-P-P-M-K”	16
Gambar 2.2. Pendekatan Proses Manajemen Strategis yang Komprehensif dalam Penyusunan <i>Roadmap</i>	18
Gambar 3.1. Hirarki Pemberdayaan Ekraf Berdasarkan Tipologi	26
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Mahakam Ulu	29
Gambar 4.2. Diagram PDRB-ADHK dan LPE di Kabupaten Mahakam Ulu, 2018–2022.....	34
Gambar 4.3. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2015–2021, Ribu Rupiah (Rp 000)	39
Gambar 4.4. Daya Tarik Arum Jeram di Sungai Riam.....	60
Gambar 4.5. Kerajinan Ukiran dan Pahatan Kayu Bercorak Dayak	61
Gambar 4.6. Kesenian Tarian Dayak.....	62
Gambar 4.7. Wisata Batu Dinding.....	62
Gambar 4.8. Peta Permasalahan Ekraf di Kabupaten Mahakam Ulu	64
Gambar 4.9. <i>Pilot Project</i> antara Ekowisata dengan Ekraf	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Batas Administrasi Wilayah	28
Tabel 4.2.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu	30
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk, <i>Sex Ratio</i> , Persentase, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022	31
Tabel 4.4.	Karakteristik Responden.....	46
Tabel 4.5.	Rencana Aksi Pertama Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	68
Tabel 4.6.	Rencana Aksi Kedua Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	71
Tabel 4.7.	Rencana Aksi Ketiga Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	72
Tabel 4.8.	Rencana Aksi Keempat Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	74
Tabel 4.9.	Rencana Aksi Kelima Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	76
Tabel 4.10.	Rencana Aksi Keenam Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mahakam Ulu	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan.....	95
Lampiran 2. Angket/Kuesioner	99